

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbatasan akses terhadap modal usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam menjalankan usaha mikro, sehingga kondisi tersebut turut memengaruhi upaya pengentasan kemiskinan pada tingkat rumah tangga (Haryani, 2019:67). Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial ekonomi yang berkaitan dengan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh modal dan mengembangkan kegiatan usaha. Keterbatasan modal dapat menghambat perempuan dari keluarga prasejahtera dalam mengembangkan usaha mikro yang menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menyediakan berbagai program pembiayaan yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap permodalan. Salah satu program tersebut adalah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program PNM Mekaar diarahkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro dengan memberikan akses pembiayaan tanpa agunan serta pendampingan kelompok. Mahyuni dkk. (2023:4) menjelaskan bahwa PNM Mekaar merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pelaku usaha mikro melalui peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal kerja tanpa agunan, pembiasaan menabung, serta pengembangan kewirausahaan.

PNM Mekaar memiliki karakteristik pembiayaan yang berbeda dengan pembiayaan perbankan pada umumnya. Pembiayaan diberikan kepada perempuan

prasejahtera secara berkelompok dan tidak mensyaratkan agunan fisik. Sistem pembayaran menggunakan mekanisme tanggung renteng sehingga anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Mahyuni dkk. (2023:4, 8) menjelaskan bahwa pembayaran angsuran PNM Mekaar bersifat tanggung renteng dan dilakukan melalui pertemuan kelompok secara berkala. Sistem tersebut juga disertai kewajiban anggota untuk mengikuti proses persiapan dan pembinaan kelompok.

Mekanisme tanggung renteng pada dasarnya bertujuan menjaga kedisiplinan pembayaran dan membangun tanggung jawab bersama antaranggota. Setiap anggota tidak hanya bertanggung jawab terhadap pinjamannya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab ketika terdapat anggota kelompok yang mengalami masalah pembayaran. Putri & Hafizha (2024:99) menjelaskan bahwa sistem tanggung renteng diterapkan agar setiap anggota bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap kewajiban pembayaran. Sistem tersebut ditujukan untuk membangun tanggung jawab kolektif dan mendukung keberhasilan pembiayaan kelompok.

Meskipun demikian, penerapan sistem tanggung renteng tidak selalu berjalan tanpa masalah. Persoalan muncul ketika anggota kelompok mengalami keterlambatan atau tidak mampu membayar angsuran. Anggota lain dapat ikut menanggung kewajiban tersebut sehingga menimbulkan beban tambahan. Putri & Hafizha (2024:103) menemukan bahwa anggota yang mengalami kondisi ekonomi tidak stabil merasa keberatan ketika harus ikut menanggung kewajiban anggota lain yang menunggak atau meninggalkan tanggung jawab pembayaran.

Selain mekanisme pembayaran, penggunaan dana pinjaman menjadi aspek penting dalam pelaksanaan PNM Mekaar. Dana pembiayaan pada dasarnya diarahkan untuk membantu perempuan pelaku usaha mikro memperoleh modal dan mengembangkan usaha. Mahyuni dkk. (2023:8) menjelaskan bahwa setelah pembiayaan disetujui, nasabah memperoleh pembekalan dan dana yang penggunaannya diarahkan sesuai kesepakatan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana menjadi bagian penting dari tujuan program PNM Mekaar.

Penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan pembiayaan dapat membantu nasabah menghasilkan pendapatan tambahan. Sebaliknya, penggunaan dana untuk kebutuhan yang tidak menghasilkan pendapatan dapat mengurangi manfaat ekonomi dari pembiayaan. Reniar dkk. (2024:17-18) menjelaskan bahwa pembiayaan PNM Mekaar Syariah diberikan sebagai modal usaha kepada perempuan prasejahtera. Namun, dalam praktiknya ditemukan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan konsumtif.

Pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan usaha nasabah PNM Mekaar. Nasabah tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk mengelola pemasukan, pengeluaran, dan penggunaan modal secara tepat. Syarif (2024:640) menjelaskan bahwa pengetahuan pengelolaan keuangan diperlukan oleh nasabah PNM Mekaar karena keterbatasan pengetahuan keuangan dapat memengaruhi keberlanjutan usaha dan konsistensi pengembalian pembiayaan.

Kemampuan mengelola keuangan menjadi semakin penting karena sebagian besar nasabah PNM Mekaar berasal dari keluarga dengan pendapatan terbatas. Syarif (2024:640) menjelaskan bahwa PNM Mekaar menyasar perempuan pelaku usaha mikro dari keluarga prasejahtera dan memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng. Kondisi tersebut membuat pengelolaan dana dan kemampuan memenuhi angsuran menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pembiayaan.

Pelaksanaan PNM Mekaar di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh berjalan melalui kelompok yang beranggotakan perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro di masing-masing wilayah. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas mengoordinasikan anggota dan menjadi penghubung dengan petugas PNM Mekaar. Kegiatan yang berjalan pada kedua kelompok tersebut sejauh ini hanya berupa pertemuan rutin untuk pemungutan angsuran mingguan. Pada pertemuan tersebut, ketua kelompok dan petugas PNM Mekaar menyampaikan pemberitahuan kepada anggota agar membayar angsuran tepat waktu. Belum terdapat kegiatan lain seperti pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, atau edukasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara rutin pada kedua kelompok tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PNM Mekaar di kedua jorong masih terbatas pada aspek penagihan dan belum menyentuh aspek pendampingan yang dapat mendukung keberhasilan usaha nasabah.

Fenomena penggunaan dana dan pembayaran angsuran juga ditemukan pada pelaksanaan PNM Mekaar di Jorong Sawah Kareh. Berdasarkan data lapangan, terdapat satu kelompok Mekaar yang beranggotakan 25 orang. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 10 orang atau 40% tercatat sering mengalami tunggakan angsuran. Sebagian anggota menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, sedangkan sebagian lainnya menggunakan dana untuk kegiatan usaha mikro seperti berjualan jajanan anak sekolah dan gorengan. Besaran pinjaman yang diterima anggota bervariasi, mulai dari Rp4.000.000, Rp8.000.000, hingga Rp10.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pemanfaatan dana pinjaman di antara anggota kelompok, yang sejalan dengan pola pemanfaatan dana pembiayaan mikro pada perempuan prasejahtera di lokasi lain (Reniar dkk., 2024:17).

Perbedaan penggunaan dana tersebut menunjukkan bahwa tidak semua anggota menggunakan pembiayaan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan tambahan. Sebagian anggota menggunakan dana untuk kegiatan usaha mikro, sedangkan sebagian lainnya menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut penting dikaji karena tujuan pembiayaan PNM Mekaar berkaitan dengan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Mahyuni dkk. (2023:8-10) menjelaskan bahwa pembiayaan PNM Mekaar diarahkan untuk modal usaha dan disertai pembinaan serta kewajiban penggunaan pembiayaan untuk kegiatan usaha.

Kondisi yang berbeda ditemukan di Jorong Bukik Tamasu. Dari 29 anggota kelompok aktif, sebanyak 20 orang atau sekitar 70% sering mengalami tunggakan angsuran. Tingkat tunggakan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Jorong Sawah Kareh. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar dalam kelancaran pembayaran angsuran pada kelompok Mekaar di Jorong Bukik

Tamasu, yang sejalan dengan bentuk-bentuk wanprestasi nasabah pembiayaan mikro pada umumnya (Husni dkk., 2025).

Pola penggunaan dana di Jorong Bukik Tamasu juga menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Sebagian besar dana pinjaman digunakan untuk biaya pendidikan anak, perbaikan rumah, pembelian barang elektronik, dan pelunasan utang sebelumnya. Besaran pinjaman berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp10.000.000 dengan jangka waktu enam bulan sampai satu tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana pinjaman tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga, sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi hal yang perlu diperhatikan (Syarif, 2024:640).

Penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif menjadi persoalan ketika dana tersebut tidak menghasilkan sumber pendapatan baru. Reniar dkk. (2024:17) menemukan bahwa sebagian nasabah PNM Mekaar Syariah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan konsumtif, seperti kebutuhan sehari-hari dan pembangunan rumah, meskipun pembiayaan pada dasarnya ditujukan untuk modal usaha. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan kondisi di Jorong Bukik Tamasu karena terdapat penggunaan dana untuk kebutuhan rumah tangga dan pelunasan utang.

Penggunaan dana pinjaman untuk konsumsi dapat menjadi persoalan ketika pendapatan keluarga tidak meningkat. Dana yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif tidak secara langsung menciptakan pendapatan baru untuk membayar angsuran. Akibatnya, nasabah tetap memiliki kewajiban pembayaran meskipun

tidak memperoleh tambahan pendapatan dari dana pinjaman. Reniar dkk. (2024:25) menunjukkan bahwa praktik penggunaan pembiayaan PNM Mekaar dapat berbeda antara tujuan pembiayaan sebagai modal usaha dengan kebutuhan yang dihadapi nasabah dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran ketika pendapatan keluarga tidak mampu menutupi kebutuhan rumah tangga sekaligus kewajiban angsuran. Penelitian Husni dkk. (2025) juga menemukan bahwa wanprestasi nasabah PNM Mekaar dapat berbentuk keterlambatan angsuran, ketidakmampuan melunasi pinjaman, serta penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan dapat berkaitan dengan persoalan pembayaran angsuran.

Beban pembayaran juga menjadi bagian penting dalam fenomena yang ditemukan di lokasi penelitian. Berdasarkan data lapangan, peminjam yang mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000 menerima dana bersih sekitar Rp9.500.000. Total kewajiban pembayaran mencapai Rp12.000.000 karena adanya bunga sebesar 25%. Apabila pinjaman diambil dengan jangka waktu enam bulan, peminjam harus membayar angsuran sekitar Rp461.500 per minggu. Sementara itu, apabila jangka waktu mencapai satu tahun, angsuran mingguan sekitar Rp230.000. Besarnya kewajiban tersebut menjadi beban tersendiri bagi rumah tangga prasejahtera, terutama ketika dana pinjaman tidak menghasilkan pendapatan tambahan, dan beban tersebut dapat semakin berat ketika ditambah dengan tanggung jawab tanggung renteng atas anggota lain (Putri & Hafizha, 2024:99).

Kondisi penggunaan dana dan tingginya tunggakan di kedua jorong menunjukkan adanya perbedaan yang menarik untuk dikaji. Jorong Sawah Kareh memiliki tingkat tunggakan sebesar 40%, sedangkan Jorong Bukik Tamasu mencapai 70%. Selain itu, sebagian anggota di Sawah Kareh menggunakan dana untuk usaha mikro, sedangkan penggunaan dana di Bukik Tamasu lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan konsumtif. Perbedaan tersebut menjadi dasar empiris untuk melihat hubungan antara pemanfaatan dana pinjaman dan kelancaran angsuran, sebagaimana pembiayaan PNM Mekaar pada dasarnya diarahkan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan (Mahyuni dkk., 2023:8-10).

Perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam mempertahankan kegiatan usaha. Dana yang digunakan untuk usaha memiliki peluang menghasilkan pemasukan yang dapat digunakan untuk membayar angsuran. Sebaliknya, dana yang digunakan untuk konsumsi tidak secara langsung memberikan tambahan pemasukan. Syarif (2024:640) menekankan pentingnya pengelolaan keuangan bagi nasabah PNM Mekaar agar keberlanjutan usaha dapat dipertahankan dan pengembalian pembiayaan dapat dilakukan secara konsisten.

Pengelolaan dana yang kurang tepat dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Ketika dana pinjaman tidak menghasilkan pendapatan tambahan, nasabah harus menggunakan pendapatan lain untuk membayar angsuran. Bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan ekonomi. Temuan Husni dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketidakmampuan membayar angsuran dapat berkaitan dengan

kondisi usaha yang tidak berkembang dan penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif.

Fenomena penggunaan dana secara konsumtif juga ditemukan secara jelas di Jorong Bukik Tamasu. Sebagian besar anggota menggunakan dana pinjaman untuk biaya pendidikan anak, perbaikan rumah, pembelian barang elektronik, dan pelunasan utang sebelumnya. Penggunaan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan penggunaan dana pinjaman. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan keluarga, sebagaimana penggunaan dana pembiayaan mikro untuk kebutuhan konsumtif tidak secara langsung menciptakan sumber pendapatan baru (Reniar dkk., 2024:17-18).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembiayaan dengan praktik pemanfaatan dana pada tingkat rumah tangga. Program PNM Mekaar diarahkan untuk memberikan modal usaha dan meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, tetapi sebagian nasabah menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif. Reniar dkk. (2024:25) menemukan bahwa penggunaan dana PNM Mekaar Syariah tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembiayaan karena sebagian nasabah menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi.

Permasalahan penggunaan dana tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi individu. Ketika nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran, sistem tanggung renteng membuat anggota lain ikut terlibat dalam penyelesaian pembayaran. Putri & Hafizha (2024:102-103) menunjukkan bahwa anggota kelompok harus menghadapi persoalan ketika terdapat nasabah yang

menunggak atau meninggalkan kewajiban pembayaran. Dalam kondisi tersebut, anggota lain dapat ikut menanggung pembiayaan yang bermasalah.

Sistem tanggung renteng pada satu sisi dapat memperkuat solidaritas kelompok. Anggota yang memiliki kemampuan pembayaran dapat membantu anggota lain yang sedang mengalami kesulitan. Namun, pada sisi lain, kewajiban tersebut dapat menimbulkan keberatan ketika tunggakan terjadi secara berulang. Putri & Hafizha (2024:104) menemukan bahwa sistem tanggung renteng memiliki sisi positif berupa kebersamaan dan gotong royong, tetapi tetap memerlukan evaluasi terkait pembagian beban tanggungan.

Persoalan tersebut juga ditemukan dalam observasi lapangan. Ketika salah satu anggota terlambat atau tidak mampu membayar angsuran, anggota lain harus menutupi kekurangan pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan rasa keberatan, ketegangan, dan konflik kecil antaranggota. Beberapa peminjam bahkan harus mencari pinjaman baru dari pihak lain untuk memenuhi cicilan Mekaar, menghindari pertemuan kelompok, atau mengalami tekanan dalam rumah tangga akibat beban finansial yang meningkat, sebagaimana kondisi serupa juga ditemukan pada praktik tanggung renteng di kelompok Mekaar lain (Putri & Hafizha, 2024:103-104).

Temuan lapangan tersebut memperlihatkan bahwa tunggakan angsuran dapat memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar keterlambatan pembayaran. Ketika anggota lain harus membantu memenuhi kewajiban tersebut, hubungan sosial dalam kelompok dapat mengalami tekanan. Putri & Hafizha (2024:103) menunjukkan bahwa nasabah dengan kondisi ekonomi tidak stabil merasa

keberatan ketika harus menanggung beban anggota lain yang menunggak atau meninggalkan kewajibannya.

Dampak ekonomi juga dapat muncul pada tingkat rumah tangga. Ketika nasabah menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, rumah tangga tidak memperoleh tambahan sumber pendapatan dari dana tersebut. Pada saat yang sama, kewajiban angsuran tetap harus dipenuhi sesuai jadwal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nasabah menggunakan pendapatan rumah tangga atau pinjaman lain untuk memenuhi kewajiban PNM Mekaar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana pinjaman memiliki kaitan dengan kemampuan rumah tangga dalam mengelola kewajiban pembiayaan, sehingga literasi pengelolaan keuangan menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan (Syarif, 2024:640).

Pengelolaan keuangan menjadi semakin penting dalam kondisi tersebut. Syarif (2024:640) menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan dapat membantu nasabah PNM Mekaar mempertahankan dan mengembangkan usaha serta menjaga konsistensi pengembalian pembiayaan. Dengan demikian, persoalan tunggakan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah pinjaman, tetapi juga dari kemampuan nasabah mengelola dana dan mengatur keuangan rumah tangga serta usaha.

Fenomena yang terjadi di Jorong Bukik Tamasu juga menunjukkan adanya perubahan fungsi pinjaman dari modal usaha menjadi sumber pembiayaan kebutuhan rumah tangga. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif digunakan untuk biaya pendidikan, perbaikan rumah, pembelian barang elektronik, dan pelunasan utang sebelumnya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan

risiko kesulitan pembayaran karena tidak terdapat sumber pendapatan baru yang berasal dari dana pinjaman, sejalan dengan temuan bahwa penggunaan dana pembiayaan mikro yang tidak sesuai peruntukan dapat memperbesar risiko gagal bayar (Husni dkk., 2025).

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada penggunaan dana, tetapi juga berkaitan dengan perilaku nasabah dalam menghadapi kewajiban angsuran. Ketika pendapatan tidak mencukupi, sebagian nasabah berupaya mencari sumber dana lain untuk memenuhi angsuran. Berdasarkan observasi lapangan, terdapat peminjam yang mencari pinjaman baru untuk menutup cicilan Mekaar dan menghindari pertemuan kelompok. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tunggakan dapat menciptakan persoalan ekonomi lanjutan bagi rumah tangga.

Perbedaan antara Jorong Sawah Kareh dan Jorong Bukik Tamasu memberikan dasar empiris yang kuat untuk melakukan penelitian. Sawah Kareh memiliki 25 anggota dengan 10 anggota atau 40% yang sering mengalami tunggakan. Sebagian anggota menggunakan dana untuk kegiatan usaha mikro. Sementara itu, Bukik Tamasu memiliki 29 anggota aktif dengan 20 anggota atau 70% yang sering mengalami tunggakan dan penggunaan dana yang lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam penggunaan dana dan kemampuan pembayaran angsuran.

Perbedaan tersebut juga memungkinkan penelitian melihat bagaimana anggota menghadapi tunggakan dan bagaimana sistem tanggung renteng berjalan dalam kelompok. Penelitian Putri & Hafizha (2024:103-104) menunjukkan bahwa tanggung renteng dapat menjadi beban bagi anggota ketika terdapat nasabah yang

menunggak, tetapi pada saat yang sama dapat membangun kebersamaan dan gotong royong. Kondisi tersebut relevan untuk melihat bagaimana mekanisme tanggung renteng berlangsung pada kelompok Mekaar di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh.

Dengan demikian, persoalan PNM Mekaar di kedua jorong tidak hanya terletak pada adanya tunggakan angsuran. Persoalan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman, kemampuan pengelolaan keuangan, kemampuan menghasilkan pendapatan dari dana pinjaman, serta mekanisme tanggung renteng. Mahyuni dkk. (2023:8-10) menunjukkan bahwa pembiayaan PNM Mekaar diarahkan untuk modal usaha, dilakukan melalui kelompok, dan disertai tanggung jawab pembayaran bersama. Syarif (2024:640) juga menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan dalam menjaga keberlanjutan usaha dan pengembalian pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji fenomena ekonomi peminjam PNM Mekaar di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh. Penelitian berfokus pada penggunaan dana pinjaman untuk kebutuhan produktif dan konsumtif, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran, mekanisme tanggung renteng, serta dampak tunggakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga. Perbedaan tingkat tunggakan dan pola penggunaan dana pada kedua jorong memberikan dasar empiris untuk memahami persoalan tersebut secara lebih mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan PNM Mekaar pada tingkat lokal.

Penelitian juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pemanfaatan dana pinjaman berkaitan dengan kelancaran pembayaran angsuran dan bagaimana tunggakan memengaruhi hubungan antaranggota kelompok serta kondisi ekonomi rumah tangga. Kajian ini penting karena tujuan PNM Mekaar sebagai program pemberdayaan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemberian modal, tetapi juga dengan kemampuan nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan secara tepat dan memenuhi kewajiban pembayaran.

1.2. Rumusan Masalah

Program Mekar dirancang berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng yang menempatkan anggota sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial untuk menjaga kelancaran angsuran. Dalam praktiknya, kelompok tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan kolektif. Setiap anggota memiliki tanggung jawab moral dan finansial terhadap anggota lain, sehingga keterlambatan pembayaran satu orang akan berdampak pada seluruh kelompok. Kondisi ini mendorong terbentuknya pola kontrol internal yang aktif, seperti saling mengingatkan jadwal pembayaran, memantau penggunaan dana, serta memberikan tekanan sosial agar anggota tetap disiplin dalam memenuhi kewajiban angsuran.

Mekanisme kontrol kelompok semakin terlihat ketika dana pinjaman digunakan secara konsumtif. Penggunaan dana untuk kebutuhan rumah tangga jangka pendek sering kali menurunkan kapasitas bayar anggota. Dalam situasi ini, kelompok berperan sebagai pengendali melalui pendekatan persuasif hingga tekanan normatif. Anggota yang mengalami kesulitan biasanya akan didatangi,

diingatkan, bahkan didorong untuk mencari sumber dana alternatif agar tetap dapat membayar angsuran tepat waktu. Pola ini menunjukkan bahwa kontrol kelompok tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berlangsung melalui interaksi sosial yang intens dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana mekanisme kelompok mengontrol anggotanya dalam menjaga kelancaran angsuran Mekar di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh?”

1.3. Tujuan Penelitian

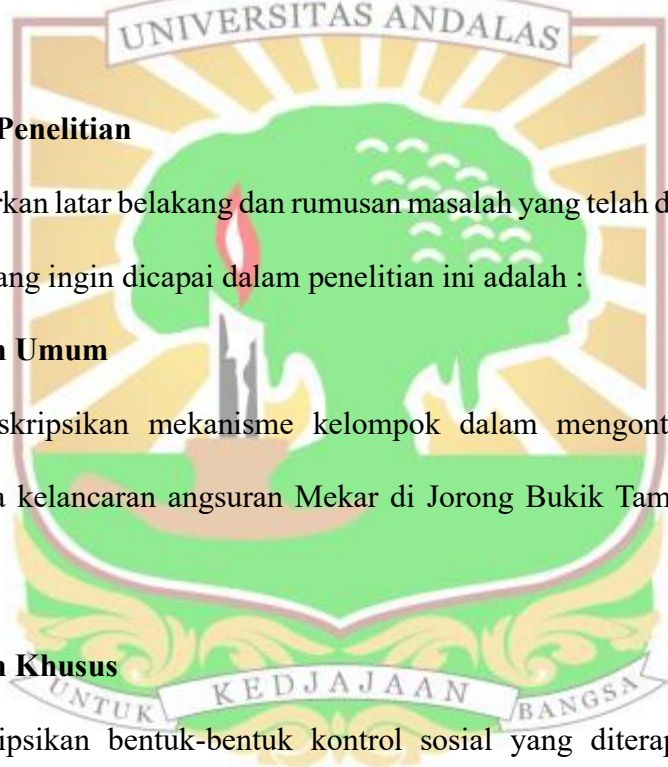
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan mekanisme kelompok dalam mengontrol anggotanya untuk menjaga kelancaran angsuran Mekar di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kontrol sosial yang diterapkan kelompok dalam mengawasi anggota terkait kewajiban angsuran.
2. Menganalisis upaya kelompok dalam menekan risiko keterlambatan pembayaran melalui sistem tanggung renteng.



1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perilaku ekonomi rumah tangga penerima program mikro dan pengaruhnya terhadap kelancaran angsuran.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Keluarga

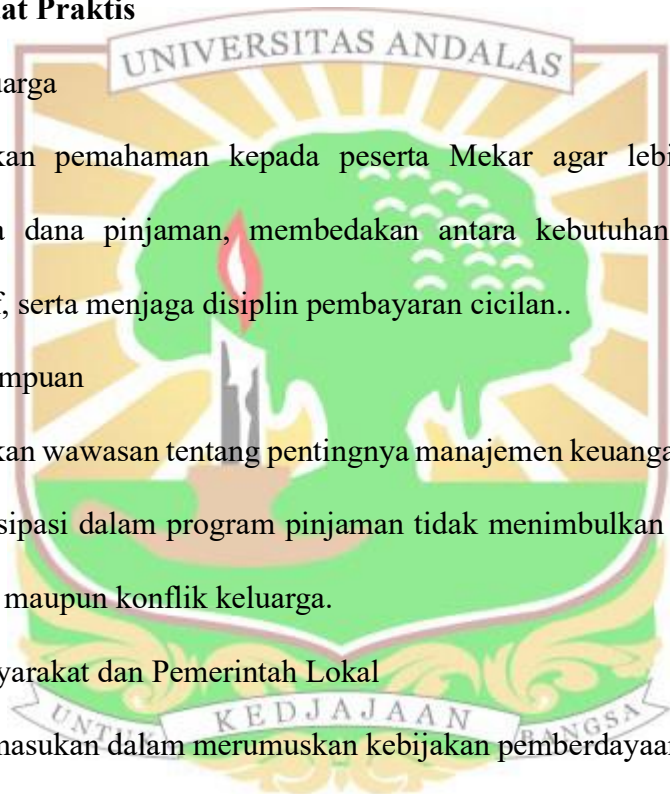
Memberikan pemahaman kepada peserta Mekar agar lebih bijak dalam mengelola dana pinjaman, membedakan antara kebutuhan produktif dan konsumtif, serta menjaga disiplin pembayaran cicilan..

2. Bagi Perempuan

Memberikan wawasan tentang pentingnya manajemen keuangan rumah tangga agar partisipasi dalam program pinjaman tidak menimbulkan beban ekonomi tambahan maupun konflik keluarga.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah Lokal

Menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat sistem pendampingan peserta agar penggunaan dana Mekar benar-benar mendukung produktivitas dan kelancaran angsuran.



1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Pinjaman

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang bermakna kepercayaan. Secara konseptual, kredit mencerminkan adanya hubungan kepercayaan antara pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak penerima pinjaman (debitur), di mana kreditur mempercayakan sejumlah dana atau nilai ekonomi tertentu kepada debitur untuk digunakan sesuai kesepakatan, dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu.

Kredit dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak pemberi dan penerima, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012: 82).

Secara yuridis, pengertian kredit diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11), yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit memiliki beberapa tujuan utama, menurut Kasmir (2012:88) antara lain:

1. Mencari Keuntungan

Pemberian kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit tersebut, terutama dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa serta biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah (Kasmir, 2012:88).

2. Membantu Usaha Nasabah

Kredit berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah untuk modal kerja maupun investasi, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, serta pendapatan di masa depan (Kasmir, 2012:88).

3. Membantu Pemerintah

Dari perspektif makroekonomi, penyaluran kredit berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan nasional, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produksi barang dan jasa, serta peningkatan devisa negara (Kasmir, 2012: 88).

Dalam penelitian ini, kredit yang dimaksud adalah pembiayaan yang disalurkan oleh PNM Mekar kepada pelaku usaha mikro. Secara mikroekonomi, pemberian kredit bertujuan menciptakan nilai tambah bagi debitur melalui peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan, serta bagi lembaga pemberi kredit sebagai bentuk keberlanjutan operasional pembiayaan.

1.5.2. Konsep PNM Mekar

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak sebagai lembaga keuangan khusus dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Indonesia. PNM didirikan pada 1 Juni 1999 dengan mandat utama untuk meningkatkan akses pembiayaan dan

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (PNM, 2023). PNM memiliki dua program pembiayaan utama, yaitu PNM ULaMM dan PNM Mekar. Program ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) menyediakan pembiayaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang disertai dengan pendampingan manajerial, pelatihan usaha, serta dukungan akses pasar. Program ini menekankan pendekatan pembiayaan langsung dan berkelanjutan.

Sementara itu, PNM Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan program pemberdayaan berbasis kelompok yang ditujukan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Mekar menyediakan pembiayaan modal kerja tanpa agunan dengan sistem tanggung renteng kelompok, disertai pendampingan usaha, pembiasaan menabung, serta peningkatan literasi keuangan dan kewirausahaan (PNM, 2023).

Program Mekar difokuskan pada perempuan dengan tingkat pendapatan rendah, yang memiliki potensi usaha namun terkendala akses pembiayaan formal akibat keterbatasan agunan, skala usaha kecil, dan persyaratan administratif. Melalui sistem pertemuan kelompok mingguan, Mekar tidak hanya menjadi sarana pembayaran angsuran, tetapi juga media edukasi dan penguatan disiplin finansial.

Pendekatan tanggung renteng dalam Mekar diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan, meningkatkan keberlanjutan usaha mikro, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga. Hingga beberapa tahun terakhir, PNM Mekar telah menjangkau jutaan nasabah perempuan di ribuan kecamatan di Indonesia dan menjadi salah satu program pembiayaan mikro terbesar berbasis pemberdayaan sosial.

1.5.3. Konsep Mekanisme Kelompok

Mekanisme kelompok merupakan serangkaian proses yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok menjalankan fungsi, mengatur hubungan antaranggota, serta mengoordinasikan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Mekanisme ini melibatkan pola interaksi yang teratur, pembagian peran, komunikasi, pengambilan keputusan, serta penerapan norma yang menjadi pedoman perilaku anggota kelompok. Dengan adanya mekanisme yang jelas, setiap anggota memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sehingga kegiatan kelompok dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam kehidupan sosial, kelompok tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan individu, tetapi sebagai suatu sistem sosial yang memiliki struktur, aturan, serta hubungan timbal balik antaranggota. Setiap anggota memiliki peran tertentu yang saling melengkapi sehingga tercipta kerja sama dalam mencapai tujuan kelompok. Oleh karena itu, mekanisme kelompok menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu kelompok dalam melaksanakan program atau kegiatan.

Mekanisme kelompok dibangun melalui interaksi sosial yang berlangsung secara berkesinambungan. Interaksi tersebut menghasilkan norma, nilai, dan pola perilaku yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota. Selain itu, mekanisme kelompok juga mencerminkan bagaimana komunikasi berlangsung, bagaimana keputusan diambil, bagaimana tugas didistribusikan, serta bagaimana konflik diselesaikan. Apabila mekanisme tersebut berjalan dengan baik, kelompok akan memiliki solidaritas yang tinggi, koordinasi yang efektif, dan tingkat partisipasi

anggota yang lebih baik.

Mekanisme kelompok yang efektif akan mendorong terciptanya koordinasi yang baik, meningkatkan rasa tanggung jawab anggota, memperkuat solidaritas, serta mendukung tercapainya tujuan kelompok secara optimal. Sebaliknya, mekanisme kelompok yang kurang berjalan dengan baik dapat menyebabkan lemahnya komunikasi, rendahnya partisipasi anggota, munculnya konflik, serta menurunkan efektivitas pelaksanaan kegiatan kelompok.

Dalam konteks penelitian mengenai kelompok nasabah PNM Mekaar, mekanisme kelompok dapat dianalisis melalui cara anggota melakukan pengawasan terhadap sesama anggota, membangun komunikasi, menjalankan tanggung jawab bersama, melaksanakan pertemuan kelompok mingguan (PKM), serta menerapkan aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Mekanisme tersebut juga terlihat dari proses pemberian dukungan, pengingat jadwal angsuran, peneguran terhadap anggota yang berpotensi menunggak, hingga penyelesaian berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran pembayaran angsuran. Dengan demikian, konsep mekanisme kelompok digunakan sebagai landasan untuk memahami bagaimana kelompok mengontrol perilaku anggotanya, membangun kepatuhan terhadap kewajiban angsuran, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kelompok dalam menjaga kelancaran angsuran Program Mekaar.

1.5.4. Konsep Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana perilaku individu dapat dikendalikan melalui berbagai mekanisme sosial yang terdapat

dalam masyarakat. Berangkat dari asumsi bahwa setiap individu memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya kontrol sosial yang berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi, dan membatasi perilaku individu agar tetap sesuai dengan nilai, norma, serta aturan yang telah disepakati bersama.

Konsep kontrol sosial menekankan bahwa kepatuhan seseorang terhadap aturan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran pribadi, tetapi juga oleh pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Keluarga, kelompok, lembaga pendidikan, organisasi, dan masyarakat merupakan unsur-unsur yang memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu melalui proses pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi maupun penghargaan. Melalui proses tersebut, individu terdorong untuk menyesuaikan tindakannya dengan harapan kelompok dan masyarakat.

Dalam kontrol sosial terdapat dua bentuk kontrol yang saling berkaitan, yaitu kontrol internal (*personal control*) dan kontrol eksternal (*social control*). Kontrol internal mengacu pada kemampuan individu untuk mengendalikan diri dan mematuhi aturan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sementara itu, kontrol eksternal mengacu pada upaya kelompok atau lembaga sosial dalam mengawasi serta memastikan bahwa setiap anggota mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Kontrol eksternal dapat dilakukan melalui pengawasan, teguran, pembinaan, pemberian sanksi, maupun bentuk tekanan sosial lainnya.

Menurut Hirschi, efektivitas kontrol sosial dipengaruhi oleh kuatnya ikatan sosial (*social bonds*) yang dimiliki individu dengan kelompok atau lingkungan

sosialnya. Ikatan sosial tersebut mencakup keterikatan dengan anggota kelompok, komitmen terhadap tujuan bersama, keterlibatan dalam berbagai kegiatan kelompok, dan kepercayaan terhadap aturan yang berlaku. Semakin kuat ikatan sosial yang dimiliki seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk mematuhi aturan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan dirinya maupun kelompoknya.

Berkaitan dengan mekanisme kelompok mengontrol anggotanya dalam menjaga kelancaran angsuran MEKAR, konsep teori kontrol sosial menjelaskan bahwa kelompok berfungsi sebagai sarana pengawasan dan pengendalian perilaku anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Kontrol tersebut diwujudkan melalui pemantauan rutin, pengingat pembayaran, teguran kepada anggota yang terlambat membayar, serta penerapan tanggung jawab bersama dalam kelompok. Selain itu, hubungan sosial yang terjalin antaranggota kelompok juga membentuk tekanan sosial yang mendorong anggota untuk tetap disiplin dalam membayar angsuran. Dengan demikian, kelancaran angsuran MEKAR tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kontrol sosial yang dijalankan oleh kelompok.

1.5.5. Tinjauan Sosiologis

1.5.5.1. Teori Dinamika Kelompok

Teori dinamika kelompok merupakan landasan teoritis utama dalam penelitian ini. Dinamika kelompok pertama kali dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1940-an sebagai kajian mengenai bagaimana kelompok terbentuk, beroperasi, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Lewin, 1947:7). Teori

ini mengkaji berbagai kekuatan internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku kelompok serta anggotanya.

Forsyth (2019:1) mendefinisikan dinamika kelompok sebagai kajian mengenai sifat kelompok, hukum perkembangannya, serta interaksinya dengan individu, kelompok lain, dan institusi yang lebih luas. Dalam penelitian ini, dinamika kelompok mencakup beberapa dimensi yang relevan, yaitu kohesi kelompok, norma kelompok, kontrol sosial, peran dan kepemimpinan, serta konflik dalam kelompok.

Pertama, kohesi kelompok. Kohesi merupakan kekuatan yang menyatukan anggota kelompok dan mendorong mereka untuk tetap menjadi bagian dari kelompok. Kelompok dengan tingkat kohesi yang tinggi cenderung memiliki hubungan antaranggota yang lebih kuat serta rasa memiliki yang lebih tinggi. Forsyth (2019:126-144) menjelaskan bahwa kohesi berkaitan dengan kesatuan kelompok, perkembangan hubungan antaranggota, serta berbagai konsekuensi kohesi terhadap perilaku anggota. Dalam konteks Mekar, kohesi kelompok berkaitan dengan sejauh mana anggota memiliki rasa kebersamaan, saling memperhatikan, dan saling mendorong untuk memenuhi kewajiban angsuran.

Kedua, norma kelompok. Norma merupakan aturan atau standar perilaku yang mengatur tindakan anggota dalam kelompok. Norma dapat bersifat eksplisit maupun implisit dan berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dalam berinteraksi. Forsyth (2019:158-163) menjelaskan bahwa norma merupakan standar kelompok yang memberikan arah terhadap perilaku anggota dan mengatur interaksi sosial dalam kelompok. Dalam kelompok Mekar, norma kelompok dapat tercermin

melalui kebiasaan membayar angsuran tepat waktu, saling mengingatkan mengenai kewajiban pembayaran, serta adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan kelompok.

Ketiga, kontrol sosial. Kelompok memiliki mekanisme kontrol sosial yang berfungsi mendorong anggota untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui teguran, tekanan sosial, pengawasan antaranggota, maupun pemberian dukungan dan kepercayaan. Dalam sistem tanggung renteng pada program Mekar, kontrol sosial menjadi penting karena kepatuhan setiap anggota memiliki keterkaitan dengan kepentingan anggota kelompok lainnya. Oleh karena itu, anggota kelompok memiliki dorongan untuk saling mengingatkan dan mengawasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran (2023:91).

Keempat, peran dan kepemimpinan dalam kelompok. Setiap kelompok memiliki pembagian peran yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelompok. Forsyth (2019:164-175) menjelaskan bahwa peran merupakan bagian penting dalam struktur kelompok karena setiap anggota dapat memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam kelompok Mekar, ketua kelompok memiliki peran penting dalam mengoordinasikan anggota, menyampaikan informasi dari petugas PNM, mengingatkan anggota mengenai kewajiban pembayaran, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kelompok. Ketua kelompok atau anggota yang memiliki pengaruh dalam kelompok juga dapat berperan sebagai mediator antara anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran dengan petugas PNM.

Kelima, konflik dalam kelompok. Konflik dapat muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, tanggung jawab, atau kemampuan antaranggota. Forsyth (2019:409) menempatkan konflik sebagai salah satu bagian penting dalam dinamika kelompok karena perbedaan kepentingan dan hubungan antaranggota dapat memengaruhi proses serta keberlangsungan kelompok. Dalam konteks Mekar, konflik dapat terjadi ketika terdapat anggota yang mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan dalam membayar angsuran. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara kepentingan untuk mempertahankan solidaritas kelompok dengan tuntutan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Kemampuan kelompok dalam mengelola konflik menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi hubungan antaranggota dan keberlanjutan kelompok.

Keenam, komunikasi kelompok. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antaranggota yang menjaga kelompok tetap terkoordinasi. Komunikasi yang lancar mempercepat penyampaian informasi soal jadwal angsuran, perubahan aturan, atau kondisi anggota yang kesulitan bayar. Dalam kelompok Mekar, komunikasi biasanya berlangsung lewat pertemuan rutin atau grup percakapan. Kelompok dengan komunikasi yang terbuka lebih cepat mendeteksi anggota yang berisiko menunggak, sehingga kontrol bisa dilakukan lebih awal.

Ketujuh, pengambilan keputusan kelompok. Dimensi ini membahas bagaimana kelompok menentukan sikap bersama, misalnya soal sanksi bagi anggota yang menunggak atau cara menutupi kekurangan angsuran. Keputusan bisa diambil lewat musyawarah kelompok atau melalui otoritas ketua. Proses ini penting karena hasil keputusan kelompok langsung memengaruhi bagaimana kontrol

terhadap anggota dijalankan, apakah lewat pendekatan persuasif atau lewat tekanan yang lebih tegas.

Kedelapan, pengaruh sosial dan konformitas. Dimensi ini melihat bagaimana tekanan dari kelompok membuat anggota menyesuaikan perilaku dengan harapan bersama. Anggota Mekar sering membayar tepat waktu bukan semata karena kewajiban individu, tapi karena tidak ingin dianggap melanggar kesepakatan kelompok. Konformitas semacam ini menjadi salah satu bentuk kontrol yang bekerja secara halus, tanpa perlu teguran langsung.

Kesembilan, kekuasaan dalam kelompok. Kekuasaan mengacu pada kemampuan sebagian anggota memengaruhi perilaku anggota lain, baik lewat posisi formal seperti ketua kelompok maupun lewat pengaruh informal seperti senioritas atau kedekatan personal. Dalam konteks Mekar, kekuasaan ini terlihat saat ketua atau anggota berpengaruh mampu menekan anggota yang menunggak untuk segera melunasi kewajibannya. Dimensi ini membantu menjelaskan sumber legitimasi di balik mekanisme kontrol kelompok.

Kesepuluh, struktur dan ukuran kelompok. Struktur kelompok mencakup bagaimana kelompok terorganisasi, termasuk jumlah anggota dan pembagian posisi di dalamnya. Kelompok Mekar biasanya beranggotakan jumlah tertentu sesuai ketentuan PNM. Ukuran kelompok yang lebih kecil cenderung memudahkan pengawasan antaranggota, sementara kelompok yang lebih besar butuh mekanisme kontrol yang lebih terstruktur agar tetap efektif.

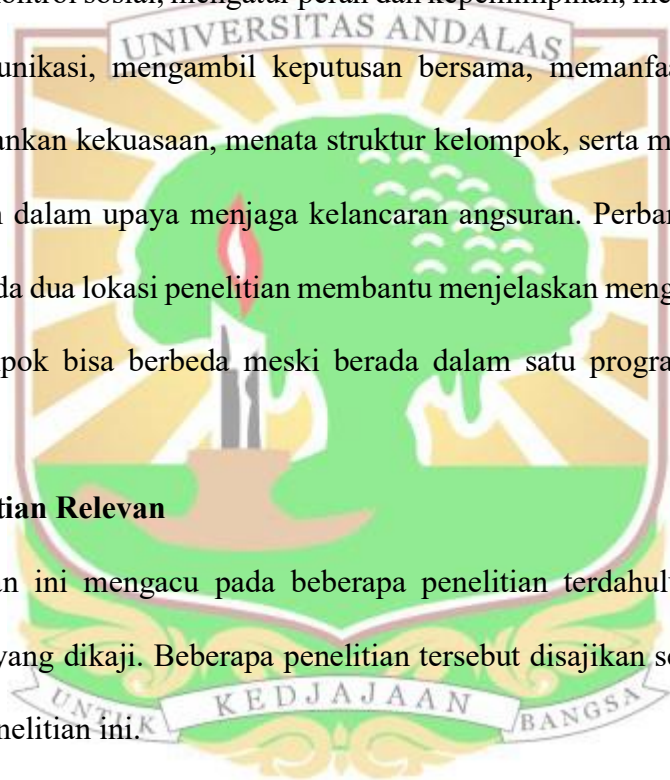
Kesebelas, perkembangan kelompok. Kelompok tidak statis, ia melewati tahapan mulai dari pembentukan, penyesuaian, hingga stabilitas. Pada tahap awal,

kelompok Mekar masih menyesuaikan norma dan kebiasaan anggotanya. Setelah berjalan beberapa siklus pinjaman, kelompok biasanya sudah punya pola kontrol yang lebih mapan. Tahapan ini penting untuk melihat apakah mekanisme kontrol kelompok berubah seiring waktu, misalnya makin longgar atau justru makin ketat.

Melalui sebelas dimensi ini, penelitian menganalisis bagaimana kelompok Mekar pada dua jorong yang berbeda membangun kohesi, membentuk norma, menjalankan kontrol sosial, mengatur peran dan kepemimpinan, mengelola konflik, menjaga komunikasi, mengambil keputusan bersama, memanfaatkan pengaruh sosial, menjalankan kekuasaan, menata struktur kelompok, serta melewati tahapan perkembangan dalam upaya menjaga kelancaran angsuran. Perbandingan sebelas dimensi ini pada dua lokasi penelitian membantu menjelaskan mengapa mekanisme kontrol kelompok bisa berbeda meski berada dalam satu program Mekar yang sama.

1.5.6. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Beberapa penelitian tersebut disajikan sebagai landasan pendukung penelitian ini.



Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Nama Penulis & Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian
1.	Rahayu & Sari (2021)	Upaya Rumah Tangga Miskin dalam Mengelola Kredit Mikro	Mengetahui upaya rumah tangga miskin dalam mengelola kredit mikro agar tetap mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.	Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan observasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjam menerapkan upaya pengaturan prioritas kebutuhan, penggunaan dana secara selektif, serta memanfaatkan dukungan keluarga untuk menjaga kelancaran angsuran.
2.	Putra (2022)	Pemanfaatan Kredit Program Mekar terhadap Kesejahteraan Perempuan Prasejahtera	Menganalisis pemanfaatan kredit Mekar serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi perempuan prasejahtera.	Metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi	Penelitian menemukan bahwa penggunaan dana kredit yang bersifat konsumtif tetap dilakukan, namun peminjam mengembangkan upaya disiplin pembayaran melalui perencanaan keuangan sederhana dan komitmen kelompok.
3.	Lestari & Handayani (2023)	Perilaku Konsumtif dan Risiko Kredit pada Nasabah Pembiayaan Mikro	Mengkaji hubungan antara perilaku konsumtif nasabah dengan risiko keterlambatan pembayaran angsuran kredit mikro.	Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis tematik	Temuan menunjukkan bahwa perilaku konsumtif meningkatkan risiko kredit, namun dapat ditekan melalui upaya adaptif peminjam seperti menambah sumber pendapatan dan pengelolaan anggaran rumah tangga.
4.	Yuliani (2024)	Peran Modal Sosial dalam Menjaga Kelancaran Angsuran Kredit Mikro	Menganalisis peran modal sosial dalam mendukung kelancaran pembayaran angsuran kredit mikro.	Metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis	Penelitian menemukan bahwa kepercayaan, norma kelompok, dan jaringan sosial berperan penting dalam mendorong tanggung jawab peminjam terhadap kewajiban angsuran.

Sumber: Olahan Data Penulis, 2026

Penelitian-penelitian terdahulu di atas memiliki relevansi dengan topik yang diteliti, namun terdapat perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dari semuanya. Pertama, semua penelitian terdahulu berfokus pada individu peminjam sebagai unit analisis, baik upaya individu, perilaku konsumtif, maupun modal sosial anggota. Penelitian ini secara eksplisit menempatkan kelompok sebagai unit analisis utama dan mengkaji mekanisme kontrol yang dibangun oleh kelompok sebagai entitas sosial, bukan oleh individu.

Kedua, penelitian terdahulu tidak menggunakan teori dinamika kelompok sebagai kerangka analitik. Penelitian ini secara langsung mengaplikasikan teori dinamika kelompok untuk menganalisis kohesi, norma, dan kontrol sosial dalam kelompok Mekar. Ketiga, penelitian ini membandingkan dua jorong dengan tingkat tunggakan yang berbeda secara sistematis, sehingga memungkinkan analisis komparatif yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Keempat, penelitian ini secara spesifik meneliti norma-norma yang dikembangkan kelompok, sebuah dimensi yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam literatur yang ada.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan upaya metodologis yang digunakan peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data, pengamatan lapangan, serta analisis terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial melalui penggalian makna, persepsi,

dan pengalaman subjek penelitian, dengan data yang disajikan dalam bentuk narasi, deskripsi, dan interpretasi terhadap kata-kata, tindakan, serta interaksi sosial yang terjadi (Afrizal, 2014).

Pendekatan kualitatif tidak berorientasi pada pengukuran atau pengujian hipotesis berbasis angka, melainkan berupaya memahami fenomena secara holistik dan kontekstual sesuai dengan kondisi alamiah subjek penelitian. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak menggunakan teknik kuantifikasi, tetapi dilakukan melalui proses interpretatif terhadap data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik serta fenomena yang diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan (Sugiyono, 2017). Melalui tipe penelitian ini, peneliti berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial subjek penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Pemilihan tipe penelitian deskriptif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menggambarkan secara mendalam mekanisme kelompok dalam mengontrol anggotanya guna menjaga kelancaran angsuran Program Mekar di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh. Penelitian ini berupaya menguraikan berbagai bentuk kontrol sosial yang diterapkan dalam kelompok, baik melalui pengawasan, pengingat pembayaran, pemberian dukungan, maupun tekanan sosial yang muncul dalam interaksi antaranggota. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana sistem tanggung renteng memengaruhi perilaku anggota dalam

memenuhi kewajiban angsuran serta bagaimana kelompok merespons anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang berperan sebagai sumber utama dalam penyediaan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Informan memberikan keterangan mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik yang mereka lakukan terkait fenomena yang diteliti melalui proses wawancara mendalam. Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif idealnya merupakan individu yang memiliki pengalaman langsung, keterlibatan nyata, serta pemahaman yang memadai terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan relevan dengan tujuan penelitian (Afrizal, 2014).

Menurut Afrizal (2014:139), informan dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Pembagian ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, baik dari sudut pandang subjek utama maupun dari pihak lain yang mengamati fenomena tersebut.

1. Informan Pelaku

Informan pelaku merupakan individu yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Program PNM Mekar di lokasi penelitian. Informan pelaku dalam penelitian ini terdiri atas ketua kelompok PNM Mekar di Jorong Bukik Tamasu, ketua kelompok PNM Mekar di Jorong Sawah Kareh, dan petugas PNM Mekar yang bertugas mendampingi kelompok di wilayah

penelitian. Informasi yang diberikan digunakan untuk memahami bentuk pengawasan, pelaksanaan pembayaran angsuran, mekanisme tanggung renteng, serta strategi yang dilakukan dalam menghadapi keterlambatan pembayaran angsuran. Adapun kriteria informan pelaku dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

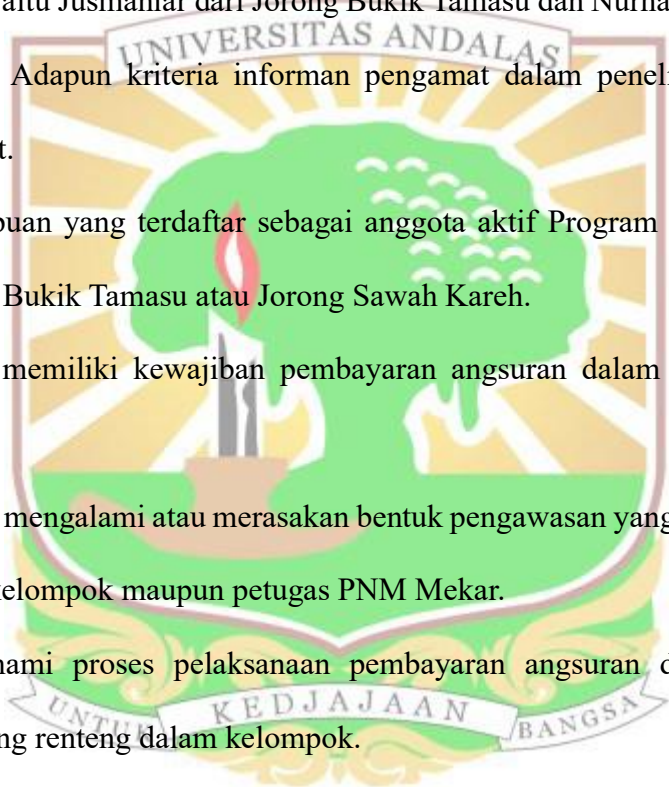
- a. Ketua kelompok PNM Mekar di Jorong Bukik Tamasu yang bertanggung jawab mengoordinasikan anggota kelompok dan mengawasi pembayaran angsuran.
- b. Ketua kelompok PNM Mekar di Jorong Sawah Kareh yang bertanggung jawab mengoordinasikan anggota kelompok dan mengawasi pembayaran angsuran.
- c. Petugas PNM Mekar yang bertugas mendampingi kelompok, memberikan pembinaan, serta memantau pelaksanaan pembayaran angsuran di wilayah penelitian.
- d. Memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai mekanisme pengawasan, pembayaran angsuran, dan sistem tanggung renteng dalam Program PNM Mekar.
- e. Bersedia diwawancarai dan memberikan informasi secara terbuka sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya mengenai pelaksanaan Program PNM Mekar.

2. Informan Pengamat

Informan pengamat merupakan anggota peminjam Program PNM Mekar yang mengalami secara langsung pelaksanaan pengawasan oleh ketua kelompok dan

petugas PNM Mekar. Informan pengamat memberikan informasi berdasarkan pengalaman mereka sebagai penerima pinjaman, khususnya mengenai bentuk pengawasan yang diterapkan, proses pembayaran angsuran, mekanisme tanggung renteng, serta dampak pengawasan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Informan pengamat dalam penelitian ini terdiri atas dua orang anggota Program PNM Mekar, yaitu Jusmaniar dari Jorong Bukik Tamasu dan Nurhayati dari Jorong Sawah Kareh. Adapun kriteria informan pengamat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 
- a. Perempuan yang terdaftar sebagai anggota aktif Program PNM Mekar di Jorong Bukik Tamasu atau Jorong Sawah Kareh.
 - b. Masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran dalam Program PNM Mekar.
 - c. Pernah mengalami atau merasakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh ketua kelompok maupun petugas PNM Mekar.
 - d. Memahami proses pelaksanaan pembayaran angsuran dan mekanisme tanggung renteng dalam kelompok.
 - e. Bersedia memberikan informasi secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan pengalaman yang dialami selama menjadi anggota Program PNM Mekar.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon informan agar sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Melalui teknik *purposive*, peneliti secara sengaja memilih individu

yang dinilai paling mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait upaya peminjam Mekar dalam menjaga kelancaran angsuran di tengah penggunaan dana pinjaman secara konsumtif. Dengan teknik ini, identitas informan telah ditentukan sejak awal penelitian berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengalaman, dan relevansi informan terhadap fenomena yang diteliti.

Tabel 1. 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Lama Menjabat/Mengikuti Program (Tahun)
Informan Pelaku			
1	Silvia Wulandari	Ketua Kelompok Mekar Jorong Bukik Tamasu	2
2	Yusanidar	Ketua Kelompok Mekar Jorong Sawah Kareh	2
3	Nopi	Petugas PNM Mekar	1
Informan Pengamat			
1	Jusmaniar	Anggota Peminjam Mekar	2
2	Nurhayati	Anggota Peminjam Mekar	2

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026

Berdasarkan tabel informan penelitian, terdapat lima orang informan yang terdiri atas tiga informan pelaku dan dua informan pengamat. Informan pelaku terdiri atas Silvia Wulandari sebagai Ketua Kelompok Mekar Jorong Bukik Tamasu yang telah menjabat selama 2 tahun, Yusanidar sebagai Ketua Kelompok Mekar Jorong Sawah Kareh yang telah menjabat selama 2 tahun, dan Nopi sebagai Petugas PNM Mekar yang telah bertugas selama 1 tahun. Sementara itu, informan pengamat terdiri atas Jusmaniar sebagai anggota peminjam Mekar dari Jorong Bukik Tamasu dan Nurhayati sebagai anggota peminjam Mekar dari Jorong Sawah Kareh, yang masing-masing telah mengikuti Program PNM Mekar selama 2 tahun. Kelima informan tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan, pembayaran angsuran, dan mekanisme tanggung renteng pada Program PNM Mekar.

1.6.3. Data yang Diambil

Menurut (Afrizal, 2014: 17), dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta perilaku manusia yang diamati secara langsung, tanpa diubah menjadi data berbentuk angka. Sumber data dalam penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek atau informan di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi terhadap petugas Mekar, ketua kelompok jorong bukit tamasu dan sawah kareh dan nasabah mekar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau pihak kedua, baik individu maupun dokumen tertulis seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, literatur, maupun artikel dari media cetak atau daring. Tujuan penggunaan data sekunder adalah untuk mendukung dan memperkuat data primer agar informasi yang dikumpulkan menjadi lebih valid dan menyeluruh. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, hasil penelitian relevan, berita, data statistik, serta buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan seperangkat metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian, baik yang bersumber dari subjek maupun dari berbagai sumber pendukung lainnya. Melalui teknik pengumpulan data, peneliti dapat menghimpun informasi berupa tuturan, tindakan, serta perilaku sosial yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Afrizal, 2014). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara intensif dan berulang dengan tujuan memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pelaksanaan wawancara tidak sepenuhnya terikat pada urutan pertanyaan yang bersifat kaku, melainkan berpedoman pada pokok-pokok pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara. Pendekatan ini memberikan ruang bagi informan untuk mengemukakan pengalaman, pandangan, serta pemaknaan mereka secara lebih luas dan mendalam terkait pelaksanaan pengawasan Program PNM Mekar.

Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara lebih rinci mengenai mekanisme kelompok dalam mengontrol anggota untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran Program PNM Mekar. Melalui wawancara mendalam, peneliti memberikan kesempatan kepada setiap informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, serta praktik yang berkaitan dengan pengawasan, pembayaran angsuran, dan sistem tanggung renteng dalam kelompok

Mekar. Sebelum turun ke lapangan, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan selama proses wawancara, sedangkan hasil wawancara dicatat dalam buku catatan lapangan dan direkam menggunakan telepon genggam agar informasi yang disampaikan informan dapat terdokumentasi dengan baik.

Pada tanggal 5 Mei 2026, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Nopi selaku Petugas PNM Mekar. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan kelompok, bentuk pengawasan terhadap anggota, pemantauan pembayaran angsuran, serta tindakan yang dilakukan ketika terdapat anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Wawancara dengan Nopi digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak yang secara langsung bertugas mendampingi dan memantau pelaksanaan Program PNM Mekar.

Pada tanggal 5 Mei 2026, peneliti juga melakukan wawancara dengan Silvia Wulandari selaku Ketua Kelompok Mekar Jorong Bukik Tamasu. Silvia Wulandari telah menjabat sebagai ketua kelompok selama 2 tahun. Wawancara berfokus pada bentuk pengawasan terhadap anggota, cara mengingatkan anggota mengenai jadwal pembayaran angsuran, pemantauan kondisi anggota, serta upaya yang dilakukan ketika terdapat anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Jusmaniar sebagai anggota peminjam Mekar di Jorong Bukik Tamasu yang telah mengikuti Program PNM Mekar selama 2 tahun. Jusmaniar merupakan anggota yang mengalami pembayaran angsuran tidak lancar. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan

pengalaman anggota dalam menerima pengawasan dari ketua kelompok dan petugas PNM Mekar, pengingat pembayaran, serta bentuk bantuan dan penyelesaian ketika mengalami kesulitan membayar angsuran.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2026, peneliti melakukan wawancara dengan Yusanidar selaku Ketua Kelompok Mekar Jorong Sawah Kareh yang telah menjabat selama 2 tahun. Wawancara berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap anggota, pengingat pembayaran angsuran, pemantauan kondisi anggota, serta upaya penyelesaian ketika terdapat anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Pada tanggal yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Nurhayati sebagai anggota peminjam Mekar di Jorong Sawah Kareh yang telah mengikuti Program PNM Mekar selama 2 tahun. Nurhayati merupakan anggota dengan pembayaran angsuran yang lancar. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan pengalaman anggota dalam menerima pengawasan dari ketua kelompok dan petugas PNM Mekar, pelaksanaan pembayaran angsuran, serta bentuk kontrol dan pengingat yang diterapkan dalam kelompok.

Dengan demikian, wawancara mendalam dalam penelitian ini melibatkan lima informan yang terdiri atas tiga informan pelaku, yaitu Silvia Wulandari sebagai Ketua Kelompok Mekar Jorong Bukik Tamasu, Yusanidar sebagai Ketua Kelompok Mekar Jorong Sawah Kareh, dan Nopi sebagai Petugas PNM Mekar, serta dua informan pengamat, yaitu Jusmaniar sebagai anggota peminjam Mekar dari Jorong Bukik Tamasu dan Nurhayati sebagai anggota peminjam Mekar dari Jorong Sawah Kareh. Kelima informan tersebut dipilih karena memiliki

pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan, pembayaran angsuran, dan mekanisme tanggung renteng Program PNM Mekar.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam konteks sosial tertentu. Dalam observasi, peneliti terlibat secara aktif dalam proses pengamatan dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai peristiwa, interaksi, serta kondisi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai realitas sosial dan perilaku nyata subjek penelitian di lapangan.

Selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Program Mekar di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh. Observasi dilakukan pada saat pertemuan kelompok mingguan, proses pembayaran angsuran, interaksi antara petugas PNM dengan ketua kelompok, serta interaksi antaranggota kelompok selama kegiatan berlangsung. Peneliti mengamati bagaimana mekanisme kontrol sosial diterapkan melalui pengingat pembayaran, musyawarah kelompok, teguran kepada anggota yang terlambat membayar, serta pelaksanaan sistem tanggung renteng ketika terdapat anggota yang mengalami kesulitan membayar angsuran. Seluruh hasil pengamatan dicatat dalam catatan lapangan dan didokumentasikan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara. Observasi tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi nyata di lapangan sehingga

memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap mekanisme kelompok dalam menjaga kelancaran angsuran Program Mekar.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti catatan tertulis, arsip, laporan kegiatan, foto, maupun rekaman audio. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sehingga temuan penelitian menjadi lebih akurat, komprehensif, dan kaya informasi.

1.6.5. Unit Analisis Data

Unit analisis merupakan satuan yang dijadikan dasar dalam proses analisis data penelitian. Penetapan unit analisis berfungsi untuk memfokuskan kajian agar penelitian memiliki arah dan batasan yang jelas. Dalam penelitian sosial, unit analisis dapat berupa individu, kelompok, maupun komunitas, tergantung pada tujuan dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah kelompok. Pemilihan unit analisis tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan subjek utama yang merepresentasikan fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pengolahan dan penafsiran data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Proses analisis data

bertujuan untuk memahami makna, pola, serta hubungan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data tidak berorientasi pada pengukuran angka atau signifikansi statistik, melainkan pada proses pengorganisasian, pengelompokan, dan penafsiran data berdasarkan tema atau pola tertentu. Oleh karena itu, analisis data kualitatif diarahkan untuk menghasilkan kategori, klasifikasi, dan tipologi yang mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam. Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Kodifikasi Data

Kodifikasi data merupakan tahap awal analisis yang dilakukan dengan cara memberikan kode atau label terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuan tahap ini adalah untuk mengorganisasi dan mengelompokkan temuan penelitian sesuai dengan fokus kajian. Proses kodifikasi dilakukan melalui penulisan ulang catatan lapangan, pemilahan informasi penting, serta pemberian tanda pada bagian data yang dianggap relevan. Selanjutnya, peneliti menafsirkan potongan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen tertulis untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Setiap hasil interpretasi kemudian diberi kode tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan kategori dan tema utama analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan dari proses analisis, di mana hasil pengodean disusun dan ditampilkan dalam bentuk kategori atau pengelompokan

data yang sistematis. Miles dan Huberman merekomendasikan penyajian data dalam berbagai bentuk visual, seperti matriks, tabel, atau diagram, agar memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan antar kategori, serta temuan utama yang muncul dari hasil analisis.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara meninjau kembali proses pengodean dan penyajian data guna memastikan konsistensi, ketepatan, serta keabsahan temuan penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan terhindar dari kekeliruan maupun bias analisis (Afrizal, 2014:180).

1.6.7. Definisi Operasional Konsep

Penelitian ini menggunakan sejumlah konsep yang memerlukan pembatasan makna agar dapat dipahami dan digunakan secara tepat dalam konteks penelitian. Definisi operasional konsep bertujuan untuk memberikan kejelasan batasan pengertian serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam proses analisis data. Dengan demikian, setiap konsep yang digunakan dalam penelitian ini memiliki makna operasional yang jelas dan terarah sesuai dengan fokus penelitian.

1. Mekanisme Kontrol Kelompok

Mekanisme kontrol kelompok diartikan sebagai serangkaian cara, aturan, dan praktik sosial yang digunakan oleh kelompok Mekar untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku anggotanya agar tetap memenuhi kewajiban angsuran.

Dalam penelitian ini, mekanisme kontrol mencakup kegiatan saling mengingatkan, pengawasan dalam pertemuan rutin, pemberian sanksi sosial, serta bentuk tekanan kolektif yang muncul dalam sistem tanggung renteng.

2. Anggota Kelompok Mekar

Anggota kelompok Mekar adalah perempuan yang terdaftar sebagai penerima pinjaman aktif dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) di bawah PT Permodalan Nasional Madani. Dalam penelitian ini, anggota yang dimaksud adalah mereka yang tergabung dalam kelompok di Jorong Bukik Tamasu dan Jorong Sawah Kareh yang memiliki kewajiban pembayaran angsuran secara berkala.

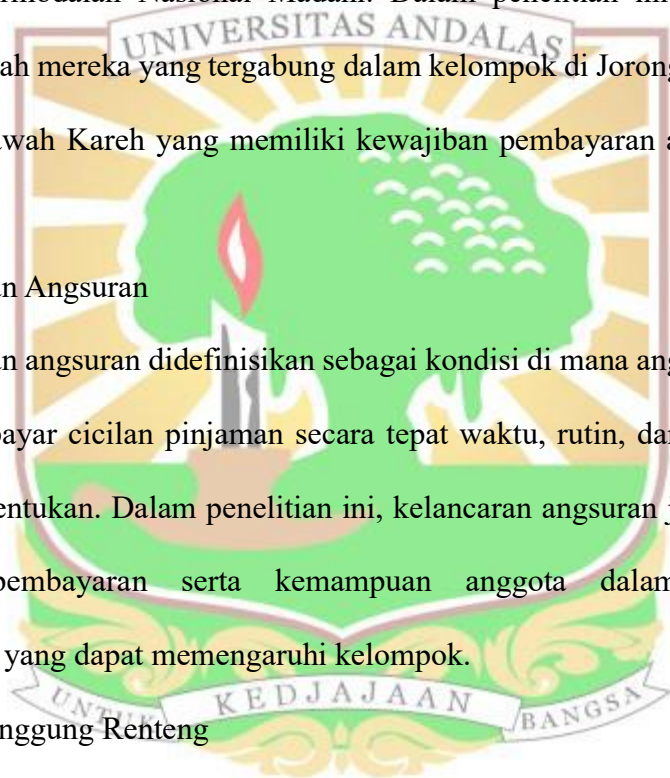
3. Kelancaran Angsuran

Kelancaran angsuran didefinisikan sebagai kondisi di mana anggota kelompok mampu membayar cicilan pinjaman secara tepat waktu, rutin, dan sesuai jumlah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, kelancaran angsuran juga dilihat dari konsistensi pembayaran serta kemampuan anggota dalam menghindari keterlambatan yang dapat memengaruhi kelompok.

4. Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng merupakan mekanisme kolektif di mana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran angsuran masing-masing anggota. Dalam konteks penelitian ini, sistem ini dipahami sebagai dasar terbentuknya kontrol sosial, karena setiap keterlambatan pembayaran akan berdampak langsung pada anggota lain dalam kelompok.

5. Tekanan Sosial dalam Kelompok



Tekanan sosial dalam kelompok merujuk pada dorongan atau tekanan yang muncul dari interaksi antaranggota untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban angsuran. Bentuk tekanan ini dapat berupa teguran, rasa malu, kekhawatiran terhadap penilaian kelompok, hingga potensi konflik jika terjadi keterlambatan pembayaran.

6. Pengawasan Pertemuan Rutin

Pengawasan pertemuan rutin adalah aktivitas kontrol yang dilakukan dalam setiap pertemuan kelompok Mekar, baik oleh ketua kelompok maupun sesama anggota. Dalam penelitian ini, pengawasan mencakup pengecekan kehadiran, pembayaran angsuran, serta evaluasi terhadap anggota yang mengalami kendala dalam pembayaran.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi: Jorong Sawah Kareh dan Jorong Bukik Tamasu. Pemilihan dua lokasi ini didasarkan pada pertimbangan komparatif yang kuat. Jorong Sawah Kareh dipilih karena memiliki satu kelompok Mekar dengan 25 anggota dan tingkat tunggakan 40% (10 orang). Kelompok di jorong ini memiliki variasi penggunaan dana yang lebih beragam, termasuk sebagian yang digunakan untuk usaha mikro. Kondisi ini memungkinkan analisis tentang faktor apa yang mendorong kelancaran pada 60% anggota dan bagaimana kelompok merespons 40% yang menunggak.

Jorong Bukik Tamasu dipilih karena menunjukkan tingkat tunggakan yang jauh lebih tinggi, yaitu 70% (20 dari 29 anggota). Tingkat tunggakan yang tinggi ini membuat mekanisme kontrol kelompok menghadapi ujian yang lebih berat dan

lebih terlihat dalam observasi lapangan. Selain itu, peneliti telah memiliki akses awal ke lokasi ini melalui observasi pendahuluan, sehingga memberikan kedalaman konteks yang lebih baik. Alasan memilih jorong ini bukan karena jorong sendiri, melainkan karena karakteristiknya yang unik sebagai kasus ekstrem tunggakan tinggi yang belum banyak diteliti. Kombinasi kedua lokasi ini memungkinkan analisis komparatif yang sistematis tentang bagaimana perbedaan tingkat tunggakan berpengaruh pada mekanisme kontrol dan norma yang dikembangkan kelompok

1.6.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan, dimulai dari Januari sampai Agustus 2026. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2026							
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Seminar Proposal (Sempro)								
2	Penyusunan Instrumen Penelitian								
3	Pengumpulan Data								
4	Analisis Data								
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi								
6	Ujian Skripsi								